Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Legitimasi Kekuasaan Politik dan Keagamaan: Peran Kanjeng Sepuh sebagai *Rojo Pandito* di Era Kolonialisme Abad XIX

Muhammad Ubaidillah Faqih
UIN Sunan Ampel Surabaya
03020223039@uinsa.ac.id

Muzaiyana
UIN Sunan Ampel Surabaya
muzaiyana@uinsa.ac.id

Abstrak: Kanjeng Sepuh Sidayu merupakan salah satu tokoh lokal di Gresik pada abad XIX yang memiliki kedudukan ganda sebagai pemimpin pemerintahan dan tokoh agama. Dalam berbagai sumber lokal, Kanjeng Sepuh dikenal sebagai Rojo Pandito, yang menggambarkan perpaduan antara otoritas politik dan keagamaan. Penelitian mengenai Kanjeng Sepuh selama ini lebih banyak membahas aspek biografi, peninggalan sejarah, dan tradisi keagamaan yang berkembang di masyarakat Sidayu. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas karakter kepemimpinan Kanjeng Sepuh sebagai Rojo Pandito serta strategi yang dijalankannya dalam menghadapi struktur kolonial pada abad XIX masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang pembentukan kepemimpinan Kanjeng Sepuh, karakter kepemimpinannya sebagai Rojo Pandito, serta strategi yang digunakan dalam menjalankan kepemimpinan di tengah kolonialisme. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan pendekatan biografi dan sejarah sosial-keagamaan. Sumber penelitian meliputi sumber primer berupa inskripsi makam, sumber lokal, dan arsip yang relevan, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Kanjeng Sepuh terbentuk dari perpaduan otoritas pemerintahan dan keagamaan. Posisi tersebut memungkinkannya menjalankan strategi kepemimpinan melalui bidang keagamaan, sosial, dan politik dalam mempertahankan pengaruhnya di tengah perubahan yang dibawa oleh pemerintahan kolonial.

Kata Kunci: *Kanjeng Sepuh Sidayu, Rojo Pandito, kepemimpinan Islam, kolonialisme, Sidayu*

PENDAHULUAN

Memasuki abad XIX, pengaruh pemerintah kolonial Belanda terhadap pemerintahan pribumi di Jawa semakin kuat. Perubahan tersebut mendorong terbentuknya administrasi dan birokrasi kolonial yang lebih teratur, termasuk perubahan kedudukan bupati sebagai bagian dari struktur pemerintahan kolonial (Kartodirdjo,

1974). Meskipun demikian, bupati tetap memiliki kedudukan sebagai pemimpin tradisional yang dekat dengan masyarakat. Kondisi ini membuat bupati menjalankan peran ganda, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kebijakan pemerintah kolonial sekaligus pemimpin lokal yang memiliki hubungan sosial dan politik dengan masyarakat (Sofiani, 2018). Kedudukan tersebut menjadikan bupati sebagai penghubung antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi serta menunjukkan adanya pertemuan antara sistem birokrasi kolonial dan struktur kekuasaan tradisional Jawa.

Dalam masyarakat Jawa, kekuasaan politik dan otoritas keagamaan dapat saling berkaitan dalam membentuk kepemimpinan lokal. Pada masa kolonial, meskipun elite birokrasi dan elite agama cenderung memiliki peran yang berbeda, terdapat tokoh yang memiliki pengaruh dalam kedua bidang tersebut. Ulama tidak hanya berperan dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga memiliki pengaruh sosial di tengah masyarakat (Darban, 2004). Sementara itu, bupati sebagai pemimpin pemerintahan pribumi memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat dan dalam kondisi tertentu juga dapat berperan dalam perkembangan kehidupan Islam (Rozal, 2012).

Pada abad XIX, Sidayu merupakan salah satu wilayah penting di kawasan Gresik Utara. Secara geografis, wilayah ini berada di kawasan pesisir dan memiliki hubungan dengan jalur Bengawan Solo sehingga mendukung aktivitas pemerintahan dan masyarakat. Sidayu pernah menjadi sebuah kadipaten dengan wilayah yang cukup luas dan meninggalkan sejumlah peninggalan, seperti alun-alun, pendopo kadipaten, dan masjid (Disparekrafbudpora, 2026; Pemerintah Desa Kauman, 2025). Dalam pemerintahan tersebut, bupati atau adipati memiliki peran penting sebagai pemimpin wilayah sekaligus penghubung antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi. Kedudukan ini menjadikan bupati sebagai salah satu elite lokal yang memiliki pengaruh dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat.

Kanjeng Sepuh Sidayu merupakan salah satu tokoh yang menempati posisi tersebut. Ia dikenal sebagai adipati atau bupati Sidayu yang memimpin pada abad XIX. Inskripsi pada makamnya menyebutkan pengangkatannya sebagai Bupati Sidayu pada tahun 1817 (Muhammad Qosim, 1856). Di samping kedudukan politiknya, Kanjeng Sepuh juga memiliki hubungan erat dengan perkembangan kehidupan Islam di Sidayu. Keberadaan Masjid Besar Kanjeng Sepuh dan makamnya yang hingga kini menjadi tempat ziarah menunjukkan kuatnya posisi Kanjeng Sepuh dalam ingatan sosial-keagamaan masyarakat (Qomariyah & Alrianingrum, 2019; Rijal, 2017). Oleh karena itu,

Kanjeng Sepuh dapat dipandang sebagai figur yang memadukan kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan dengan pengaruh keagamaan dalam masyarakat Sidayu.

Kedudukan Kanjeng Sepuh sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus tokoh agama kemudian melahirkan sebutan *Rojo Pandito* dalam narasi lokal masyarakat Sidayu. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan sosok Kanjeng Sepuh sebagai seorang bupati yang juga memiliki kedudukan dan pengaruh sebagai ulama. Media NU Gresik menyebut Kanjeng Sepuh sebagai "bupati yang ulama atau ulama yang menjadi seorang bupati", yang kemudian dikenal dengan sebutan *Rojo Pandito* (Redaksi NUGres, 2022). Sebutan tersebut menunjukkan adanya perpaduan antara otoritas politik dan otoritas keagamaan dalam diri Kanjeng Sepuh. Sebagai bupati, ia memiliki kewenangan dalam pemerintahan Kadipaten Sidayu, sedangkan sebagai ulama ia memperoleh legitimasi dan pengaruh melalui kehidupan keagamaan masyarakat. Perpaduan kedua kedudukan tersebut menjadikan Kanjeng Sepuh tidak hanya dipandang sebagai pejabat pemerintahan, tetapi juga sebagai figur keagamaan yang dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, konsep *Rojo Pandito* dapat digunakan sebagai titik masuk untuk melihat karakter kepemimpinan Kanjeng Sepuh, khususnya bagaimana kedudukan sebagai bupati dan ulama dijalankan dalam situasi kolonial pada abad XIX.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan gambaran mengenai keberadaan dan warisan Kanjeng Sepuh Sidayu dari berbagai perspektif. Qomariyah dan Alrianingrum dalam artikel jurnalnya dengan judul "Wisata Religi Makam Kanjeng Sepuh Sidayu Tahun 2000-2011", memusatkan perhatiannya pada perkembangan makam Kanjeng Sepuh sebagai wisata religi serta tradisi Jumat Pahing yang berkembang di masyarakat Sidayu (Qomariyah & Alrianingrum, 2019). Sementara itu, Maharani Firda Prasasti dalam skripsinya dengan judul "Tipologi dan Ragam Hias Nisan di Situs Kompleks Pemakaman Ki Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik Jawa Timur", mengkaji situs kompleks pemakaman Kanjeng Sepuh melalui pendekatan arkeologis, khususnya tipologi dan ragam hias nisan serta hubungan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan lokal (Prasasti, 2022). Skripsi Fivi Khusniyah dengan judul "Prasasti pada Situs Makam dan Masjid Jamik Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik" membahas mengenai prasasti pada makam dan Masjid Jamik Kanjeng Sepuh juga lebih menekankan pada isi prasasti dan aspek kronologis sebagai sumber untuk memahami sejarah Sidayu dan peninggalan Kanjeng Sepuh (Khusniyah, 2009). Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kanjeng Sepuh telah dikaji dari aspek peninggalan fisik, sejarah situs, serta tradisi sosial-

keagamaan masyarakat. Namun, kajian yang secara khusus menempatkan Kanjeng Sepuh sebagai seorang pemimpin yang memiliki dua otoritas, yaitu sebagai bupati dan tokoh agama, serta menganalisis bagaimana kepemimpinannya dijalankan dalam struktur kolonial pada abad XIX masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji Kanjeng Sepuh sebagai *Rojo Pandito*, dengan melihat perpaduan antara otoritas pemerintahan dan keagamaan serta strategi kepemimpinannya dalam menghadapi dinamika kolonialisme di Sidayu pada abad XIX.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada kepemimpinan Kanjeng Sepuh Sidayu dalam konteks kehidupan politik dan keagamaan masyarakat Sidayu pada abad XIX. Pembahasan diarahkan pada tiga persoalan utama, yaitu latar belakang dan proses terbentuknya kepemimpinan Kanjeng Sepuh Sidayu, karakter kepemimpinannya sebagai *Rojo Pandito* yang memadukan kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus tokoh agama, serta cara Kanjeng Sepuh menjalankan kepemimpinannya dalam menghadapi kondisi kolonial di Sidayu. Ketiga persoalan tersebut dikaji untuk melihat bagaimana kedudukan politik dan otoritas keagamaan Kanjeng Sepuh saling berkaitan dalam membentuk pola kepemimpinan dan mempertahankan pengaruhnya di tengah perubahan pemerintahan kolonial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2003). Tahap heuristik dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan Kanjeng Sepuh, pemerintahan Sidayu, struktur pemerintahan kolonial, serta kehidupan sosial-keagamaan masyarakat pada abad XIX. Sumber yang digunakan terdiri atas sumber primer berupa arsip dan dokumen kolonial serta sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Sumber-sumber tersebut kemudian melalui tahap kritik untuk menilai keaslian dan kredibilitas informasi sebelum digunakan dalam penelitian. Tahap interpretasi dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta sejarah mengenai kedudukan Kanjeng Sepuh sebagai bupati, hubungannya dengan pemerintah kolonial dan elite lokal, serta perannya dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu menyusun hasil interpretasi tersebut menjadi uraian sejarah yang analitis dan kronologis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah politik dan sejarah sosial-keagamaan untuk memahami kepemimpinan Kanjeng Sepuh secara lebih menyeluruh. Pendekatan sejarah politik digunakan untuk mengkaji kedudukannya sebagai bupati,

hubungan dengan struktur pemerintahan kolonial, serta praktik kekuasaan pada tingkat lokal (Kartodirdjo, 1992). Sementara itu, pendekatan sosial-keagamaan digunakan untuk melihat hubungan Kanjeng Sepuh dengan masyarakat Muslim, ulama, dan aktivitas keagamaan di Sidayu. Pemahaman mengenai kekuasaan dan kepemimpinan dalam masyarakat Jawa merujuk pada kajian Moertono mengenai pemerintahan dan konsep kekuasaan Jawa, khususnya hubungan antara penguasa, masyarakat, serta dimensi politik dan religius dalam tradisi pemerintahan Jawa (Moertono, 1968). Kerangka tersebut digunakan untuk memahami konsep *Rojo Pandito* sebagai karakter kepemimpinan yang mempertemukan kedudukan Kanjeng Sepuh sebagai pemimpin pemerintahan dengan otoritasnya sebagai tokoh agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sidayu dan Kanjeng Sepuh dalam Konteks Kolonialisme Abad XIX

Pada abad XIX, Sidayu merupakan salah satu pusat pemerintahan penting di wilayah Gresik Utara. Secara historis, Sidayu telah berkembang sebagai permukiman sekaligus pusat pemerintahan sebelum masuk dalam perubahan administrasi kolonial. Struktur kota Sidayu memperlihatkan keberadaan unsur pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang cukup lengkap, seperti alun-alun, kompleks kediaman bupati, masjid, dan pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Sidayu tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang berlangsungnya aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat. Pada masa kolonial, perkembangan Sidayu kemudian memperlihatkan pertemuan antara unsur budaya Islam yang telah berkembang sebelumnya dengan pengaruh kolonial dalam administrasi dan tata ruang kota (Inagurasi, 2002; Zahroh dkk., 2024).

Masuknya Sidayu ke dalam pemerintahan kolonial membawa perubahan terhadap kedudukan administratif wilayah tersebut. Pada abad XIX, Sidayu berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda dan menjadi salah satu wilayah yang memiliki pemerintahan kabupaten dengan bupati sebagai pemimpinnya. Perubahan administratif juga terjadi dalam perjalanan abad tersebut. Sumber mengenai sejarah Sidayu mencatat bahwa sekitar 1824 wilayah Sidayu mengalami perubahan hubungan administratif dari Keresidenan Gresik ke Keresidenan Surabaya. Meskipun berada dalam struktur pemerintahan kolonial, Sidayu tetap mempertahankan sejumlah unsur tata ruang pemerintahan tradisional, seperti alun-alun dan kompleks kediaman bupati. Hal ini menunjukkan bahwa

pemerintahan kolonial tidak sepenuhnya menghapus struktur pemerintahan lokal yang telah berkembang sebelumnya, tetapi memanfaatkannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah (Inagurasi, 2002; Zahroh dkk., 2024).

Dalam pemerintahan kolonial, bupati menempati posisi penting sebagai pemimpin pribumi di tingkat lokal. Kedudukan tersebut menjadikan bupati berada pada posisi yang menghubungkan kepentingan pemerintah kolonial dengan kehidupan masyarakat pribumi. Dalam konteks Sidayu, keberadaan kompleks pemerintahan, kediaman bupati, dan alun-alun menunjukkan bahwa bupati memiliki posisi sentral dalam struktur pemerintahan dan tata kehidupan kota. Namun, kedudukan tersebut tidak hanya berkaitan dengan fungsi administratif, sebab bupati juga memiliki hubungan sosial dengan masyarakat serta menjadi bagian dari struktur elite lokal. Dengan demikian, posisi bupati di Sidayu dapat dipahami sebagai perpaduan antara jabatan dalam pemerintahan kolonial dan kedudukan tradisional sebagai pemimpin masyarakat. Struktur tersebut menjadi penting untuk memahami posisi Kanjeng Sepuh yang menjalankan kekuasaan pada saat Sidayu berada dalam lingkungan pemerintahan kolonial (Inagurasi, 2002).

Kanjeng Sepuh merupakan salah satu bupati Sidayu yang memiliki kedudukan penting dalam sejarah wilayah tersebut. Berdasarkan keterangan pada prasasti makamnya, Kanjeng Sepuh yang bernama Raden Adipati Arya Suryadiningrat diangkat sebagai Bupati Sidayu pada tahun 1817. Ia sebelumnya berasal dari Kudus dan disebut dipindahkan ke Sidayu pada tahun 1808 sebelum kemudian menduduki jabatan sebagai bupati. Kanjeng Sepuh memimpin Sidayu hingga wafat pada 9 Maret 1856. Informasi tersebut menjadikan tahun 1817 sebagai titik penting untuk melihat awal kepemimpinan Kanjeng Sepuh di Sidayu. Kedudukannya sebagai bupati juga menjadi dasar untuk memahami peran politiknya sekaligus perkembangan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Sidayu pada abad XIX (Disparekrafbudpora, 2026; Khusniyah, 2009).

Kehidupan masyarakat Sidayu pada abad XIX tidak dapat dilepaskan dari kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan sosial dan ruang kota. Kajian arkeologi menunjukkan bahwa Sidayu memiliki karakter budaya yang mempertemukan unsur Islam dan kolonial. Keberadaan masjid, kompleks makam, alun-alun, dan pusat pemerintahan dalam satu kawasan memperlihatkan keterkaitan antara kehidupan keagamaan, sosial, dan politik masyarakat. Masjid juga menjadi salah satu unsur penting dalam perkembangan kota Sidayu, sementara keberadaan makam para bupati di sekitar masjid menunjukkan hubungan antara otoritas pemerintahan dan kehidupan keagamaan. Dalam konteks

tersebut, masyarakat Sidayu berkembang dalam lingkungan sosial yang memiliki tradisi keislaman yang kuat. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu ruang penting bagi terbentuknya pengaruh Kanjeng Sepuh tidak hanya sebagai bupati, tetapi juga sebagai tokoh agama yang dekat dengan masyarakat (Khusniyah, 2009; Rozat, 2024).

Kanjeng Sepuh sebagai Rojo Pandito

Kanjeng Sepuh sebagai Rojo

Kanjeng Sepuh, yang dikenal dengan nama Raden Adipati Suryo Diningrat atau R.A.A. Suroadiningrat III, merupakan Bupati Sidayu yang memimpin wilayah tersebut sejak 1817 hingga wafat pada 1856. Kedudukannya sebagai bupati menunjukkan bahwa Kanjeng Sepuh merupakan bagian dari elite pemerintahan pribumi yang memiliki otoritas dalam mengelola Sidayu. Inskripsi pada kompleks makam Kanjeng Sepuh menjadi salah satu sumber penting mengenai masa kepemimpinannya, sementara kajian mengenai Sidayu juga menempatkan makamnya sebagai bagian dari kompleks pemerintahan dan keagamaan di kawasan pusat kota lama Sidayu (Khusniyah, 2009; Zahroh dkk., 2024). Dengan masa kepemimpinan yang berlangsung hampir empat dekade, Kanjeng Sepuh menempati posisi penting dalam perkembangan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Sidayu pada abad XIX.

Sebagai bupati, Kanjeng Sepuh menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah Sidayu dalam lingkungan pemerintahan kolonial. Kedudukannya tidak dapat dipisahkan dari struktur pemerintahan pribumi yang menempatkan bupati sebagai pemimpin lokal sekaligus bagian dari tata administrasi kolonial. Keberadaan alun-alun, kompleks kediaman bupati, masjid, dan pasar dalam satu kawasan memperlihatkan bahwa pusat pemerintahan Sidayu juga menjadi ruang berlangsungnya aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat (Inagurasi, 2002; Zahroh dkk., 2024). Dengan demikian, fungsi Kanjeng Sepuh sebagai *Rojo* tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga dengan pengelolaan kehidupan masyarakat dalam ruang politik dan sosial Sidayu.

Kedudukan Kanjeng Sepuh sebagai bupati menempatkannya dalam lingkungan elite politik pribumi yang berhubungan dengan pejabat pemerintahan kolonial maupun elite lokal lainnya. Posisi bupati pada masa kolonial memungkinkan terjadinya hubungan antara kepentingan pemerintah kolonial dengan struktur kekuasaan lokal yang telah berkembang sebelumnya. Dalam konteks Sidayu, kedudukan bupati terlihat dari keberadaan kompleks pemerintahan yang berpusat di sekitar alun-alun dan kediaman

bupati (Inagurasi, 2002). Oleh karena itu, Kanjeng Sepuh dapat ditempatkan sebagai bagian dari elite lokal yang memiliki otoritas formal melalui jabatan pemerintahan sekaligus memiliki jaringan sosial di lingkungan masyarakat Sidayu. Hubungan tersebut menjadi penting karena kekuasaan bupati pada masa kolonial tidak hanya ditentukan oleh hubungan administratif dengan pemerintah kolonial, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan pengaruh di tingkat lokal.

Hubungan Kanjeng Sepuh dengan pemerintah kolonial perlu dipahami melalui kedudukannya sebagai bupati dalam struktur pemerintahan kolonial. Sebagai pejabat pribumi, ia berada dalam sistem pemerintahan yang mengharuskannya berhubungan dengan kekuasaan kolonial, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki kedudukan sebagai pemimpin lokal. Sejumlah cerita lokal menggambarkan Kanjeng Sepuh sebagai tokoh yang memiliki sikap tegas terhadap pemerintah Belanda, tetapi keterangan tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari tradisi atau ingatan masyarakat apabila belum ditemukan dokumen kolonial yang secara langsung mengonfirmasi peristiwa tersebut. Karena itu, hubungan Kanjeng Sepuh dengan pemerintah kolonial dalam penelitian ini lebih aman dipahami sebagai hubungan antara pejabat pribumi dan pemerintah kolonial yang memungkinkan adanya ruang kerja sama, negosiasi, maupun batas-batas tertentu dalam menjalankan kekuasaan. Pendekatan ini juga menghindarkan penelitian dari kesimpulan awal bahwa Kanjeng Sepuh merupakan tokoh yang secara terbuka melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Kanjeng Sepuh sebagai Pandito

Selain dikenal sebagai bupati, Kanjeng Sepuh juga memiliki kedudukan penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat Sidayu. Penyebutan dirinya sebagai tokoh yang alim dan memiliki perhatian terhadap perkembangan Islam banyak ditemukan dalam sumber lokal dan tradisi masyarakat. Kedudukan tersebut juga diperkuat oleh keberadaan kompleks makamnya yang berada di belakang Masjid Besar Kanjeng Sepuh, sebuah masjid bersejarah yang telah ada sejak abad XVIII (Zahroh dkk., 2024). Dengan demikian, sebutan *Pandito* dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan sisi keagamaan Kanjeng Sepuh yang berkembang berdampingan dengan kedudukannya sebagai bupati. Namun, istilah tersebut perlu dipahami sebagai karakter kepemimpinan dalam konteks masyarakat Jawa-Islam, bukan semata-mata sebagai jabatan formal keulamaan.

Peran Kanjeng Sepuh dalam kehidupan keagamaan Sidayu dapat dilihat melalui keterkaitannya dengan perkembangan pusat-pusat keislaman di kawasan pusat kota Sidayu. Masjid Jami' Sidayu yang kini dikenal sebagai Masjid Besar Kanjeng Sepuh merupakan salah satu bangunan penting dalam sejarah keagamaan Sidayu. Kajian mengenai masjid tersebut menunjukkan bahwa bangunan ini telah berdiri sejak 1758 dan menjadi bagian dari kompleks kota lama Sidayu yang berdekatan dengan alun-alun serta kompleks pemerintahan (Rozat, 2024; Zahroh dkk., 2024). Walaupun masjid tersebut didirikan sebelum masa pemerintahan Kanjeng Sepuh, keberadaannya menunjukkan bahwa kehidupan keagamaan telah menjadi bagian dari struktur masyarakat Sidayu dan kemudian berkaitan erat dengan figur Kanjeng Sepuh dalam ingatan masyarakat.

Hubungan Kanjeng Sepuh dengan masyarakat Muslim dapat dilihat dari kuatnya keterkaitan antara figur dirinya, masjid, dan kompleks makam yang berkembang sebagai pusat kehidupan keagamaan masyarakat Sidayu. Masjid Besar Kanjeng Sepuh hingga sekarang menjadi tempat berlangsungnya berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, seperti salat Jumat, pengajian, dakwah, pendidikan, serta kegiatan sosial-keagamaan lainnya (Kementerian Agama Republik Indonesia, t.t.). Meskipun data mengenai aktivitas tersebut merupakan kondisi masa kini dan tidak dapat secara langsung digunakan untuk menggambarkan aktivitas Kanjeng Sepuh pada abad XIX, keberlanjutan fungsi keagamaan kawasan tersebut memperlihatkan kuatnya hubungan antara warisan Kanjeng Sepuh dengan kehidupan keislaman masyarakat Sidayu. Oleh karena itu, hubungan Kanjeng Sepuh dengan masyarakat Muslim perlu dipahami melalui bukti historis yang tersedia dan perkembangan ingatan masyarakat terhadap figur tersebut.

Masjid menjadi salah satu ruang penting dalam perkembangan kehidupan Islam di Sidayu. Kajian mengenai Masjid Besar Kanjeng Sepuh menunjukkan bahwa bangunan tersebut merupakan salah satu peninggalan penting kawasan kota lama Sidayu dan memiliki keterkaitan dengan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat (Rijal, 2017; Zahroh dkk., 2024). Dalam perkembangannya, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan aktivitas sosial-keagamaan. Hal tersebut memberikan konteks bagi pemahaman mengenai posisi Kanjeng Sepuh sebagai *Pandito*, sebab otoritas keagamaan seorang pemimpin lokal tidak hanya terbentuk melalui gelar atau keturunan, tetapi juga melalui keterhubungan dengan lembaga keagamaan dan masyarakat. Dengan demikian, masjid dan jaringan keagamaan

menjadi salah satu ruang yang memungkinkan pengaruh politik dan keagamaan Kanjeng Sepuh bertemu dalam kehidupan masyarakat Sidayu.

Dari kedua sisi tersebut, istilah *Rojo Pandito* dapat digunakan untuk membaca kepemimpinan Kanjeng Sepuh sebagai perpaduan antara otoritas politik dan otoritas keagamaan. Sebagai *Rojo*, ia memperoleh otoritas formal melalui kedudukannya sebagai Bupati Sidayu dalam struktur pemerintahan. Sementara sebagai *Pandito*, pengaruhnya berkaitan dengan kedudukannya dalam kehidupan Islam dan ingatan keagamaan masyarakat. Kedua sisi tersebut tidak harus dipandang sebagai dua peran yang terpisah, tetapi dapat saling memperkuat dalam membentuk legitimasi kepemimpinan lokal. Dalam konteks masyarakat Jawa, hubungan antara kekuasaan, masyarakat, dan dimensi religius memang menjadi bagian penting dalam memahami praktik pemerintahan dan legitimasi penguasa (Moertono, 1968). Karena itu, *Rojo Pandito* dalam konteks Kanjeng Sepuh menunjukkan bagaimana seorang elite lokal dapat menjalankan otoritas pemerintahan sekaligus memperoleh pengaruh melalui kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Sidayu.

Strategi Kepemimpinan Kanjeng Sepuh di Tengah Kolonialisme

Strategi Keagamaan

Kepemimpinan Kanjeng Sepuh dalam bidang keagamaan dapat dilihat dari keterkaitannya dengan perkembangan Islam di Sidayu. Keberadaan Masjid Besar Kanjeng Sepuh menjadi salah satu peninggalan penting yang memperlihatkan hubungan antara pusat pemerintahan dan kehidupan keagamaan masyarakat. Masjid tersebut telah berdiri sejak 1758, sehingga keberadaannya telah mendahului masa kepemimpinan Kanjeng Sepuh, tetapi kemudian menjadi bagian penting dari kompleks pemerintahan dan kehidupan sosial-keagamaan Sidayu. Kedekatan antara masjid, alun-alun, dan kompleks makam bupati menunjukkan bahwa kehidupan politik dan keagamaan berada dalam ruang yang saling berdekatan (Inagurasi, 2002; Zahroh dkk., 2024).

Beliau memerintah dengan memegang teguh ajaran Islam dan mengutamakan nilai-nilai moral keagamaan dalam mengatur rakyatnya. Ajaran Islam tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan pribadinya, tetapi juga menjadi dasar dalam menjalankan kepemimpinan di tengah masyarakat Sidayu. Dalam menjalankan pemerintahan, Kanjeng Sepuh berusaha menempatkan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap masyarakat sebagai bagian dari kepemimpinannya. Kedudukannya sebagai

bupati memberikan kewenangan dalam urusan pemerintahan, sedangkan kedekatannya dengan kehidupan keagamaan memberikan pengaruh sosial di tengah masyarakat. Perpaduan antara kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan dan tokoh agama tersebut membuat kepemimpinan Kanjeng Sepuh tidak hanya dipandang dari sisi kekuasaan politik, tetapi juga dari keteladanan moral dan keagamaan. Dalam konteks ini, peran Kanjeng Sepuh sebagai tokoh agama dapat dipahami melalui upayanya mempertahankan dan mengembangkan kehidupan Islam yang telah menjadi bagian dari masyarakat Sidayu. Tradisi lokal juga mengenang Kanjeng Sepuh sebagai tokoh yang aktif dalam memperjuangkan kehidupan Islam, meskipun keterangan tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari memori masyarakat apabila tidak didukung oleh sumber sezaman (Pemerintah Desa Kauman, 2025).

Strategi Sosial

Selain melalui kehidupan keagamaan, pengaruh Kanjeng Sepuh juga berkembang melalui kedekatannya dengan masyarakat. Sumber lokal menggambarkan Kanjeng Sepuh sebagai pemimpin yang memperhatikan kehidupan rakyat dan berusaha mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung. Salah satu cerita yang berkembang menyebutkan bahwa ia sering berkeliling wilayah kadipaten untuk melihat kondisi rakyatnya. Sumber yang sama juga mengaitkan kepemimpinannya dengan upaya melindungi masyarakat dari berbagai tekanan pada masa kolonial (Pemerintah Desa Kauman, 2025). Meskipun kisah tersebut belum dapat seluruhnya diverifikasi melalui sumber kolonial sezaman, keberadaannya menunjukkan bagaimana masyarakat Sidayu membangun ingatan mengenai Kanjeng Sepuh sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Dengan demikian, kedekatan sosial menjadi salah satu unsur yang membantu membentuk legitimasi Kanjeng Sepuh di luar kewenangan formalnya sebagai bupati.

Strategi Politik

Dalam bidang politik, posisi Kanjeng Sepuh sebagai bupati menempatkannya dalam struktur pemerintahan yang berada di bawah pengaruh kolonial Belanda. Karena itu, kepemimpinannya tidak tepat langsung dikategorikan sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap pemerintah kolonial(Tim Pustaka Jawatimuran, 2007). Sumber lokal memang menyebut adanya sikap kritis Kanjeng Sepuh terhadap kebijakan Belanda, khususnya berkaitan dengan pajak, bahkan terdapat cerita mengenai keberaniannya menyampaikan keberatan dalam pertemuan dengan pemerintah Belanda (Pemerintah Desa Sidomulyo, 2023). Namun, karena keterangan tersebut terutama berasal dari sumber

lokal dan tradisi yang berkembang kemudian, bukti tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya gerakan perlawanan politik secara terbuka. Lebih tepat jika strategi Kanjeng Sepuh dipahami sebagai bentuk negosiasi dan penggunaan ruang kekuasaan yang tersedia dalam kedudukannya sebagai bupati. Ia tetap menjalankan fungsi pemerintahan dalam struktur kolonial, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan pengaruhnya di tengah masyarakat. Pola tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara elite pribumi dan pemerintah kolonial tidak selalu berbentuk perlawanan atau kepatuhan sepenuhnya, melainkan dapat berlangsung melalui negosiasi dan penyesuaian kepentingan.

Ketiga bentuk tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Kanjeng Sepuh tidak hanya bertumpu pada kekuasaan formal sebagai bupati. Strategi keagamaan memberikan legitimasi melalui kehidupan Islam, strategi sosial membangun kedekatan dengan masyarakat, sedangkan strategi politik memungkinkan Kanjeng Sepuh mempertahankan kedudukannya dalam struktur pemerintahan kolonial. Dengan demikian, karakter *Rojo Pandito* dapat dilihat dalam kemampuan menggabungkan otoritas pemerintahan dengan pengaruh sosial-keagamaan. Dalam situasi kolonial, perpaduan tersebut memungkinkan Kanjeng Sepuh tetap memiliki ruang untuk menjalankan pengaruhnya tanpa harus selalu mengambil bentuk konfrontasi langsung dengan pemerintah Belanda.

KESIMPULAN

Kepemimpinan Kanjeng Sepuh Sidayu terbentuk dari perpaduan kedudukan formalnya sebagai Bupati Sidayu sejak 1817 hingga 1856 dengan lingkungan sosial Sidayu yang kuat nilai keislamannya. Sidayu pada abad XIX berada dalam struktur pemerintahan kolonial, tetapi tetap mempertahankan unsur tata ruang pemerintahan tradisional, seperti alun-alun, kompleks kediaman bupati, dan masjid yang berdekatan dalam satu kawasan. Kedekatan ruang politik dan ruang keagamaan ini menjadi landasan bagi Kanjeng Sepuh untuk memperoleh otoritas tidak hanya dari jabatannya, tetapi juga dari keterhubungannya dengan kehidupan Islam masyarakat.

Karakter kepemimpinan Kanjeng Sepuh sebagai *Rojo Pandito* terletak pada perpaduan dua otoritas yang saling memperkuat. Sebagai *Rojo*, ia memegang kewenangan formal dalam pemerintahan kadipaten. Sebagai *Pandito*, ia memiliki pengaruh keagamaan yang terbentuk melalui hubungannya dengan masjid, kompleks makam, dan ingatan sosial-keagamaan masyarakat Sidayu. Istilah *Pandito* di sini lebih

tepat dipahami sebagai karakter kepemimpinan dalam konteks masyarakat Jawa-Islam, bukan sebagai jabatan formal keulamaan.

Dalam menghadapi kolonialisme, Kanjeng Sepuh menjalankan strategi keagamaan, sosial, dan politik yang bertumpu pada legitimasi lokal, bukan pada konfrontasi terbuka. Strategi keagamaan memberinya legitimasi melalui kehidupan Islam, strategi sosial membangun kedekatan dengan rakyat, dan strategi politik berupa negosiasi memungkinkannya mempertahankan posisi dalam struktur kolonial. Sebagian besar gambaran tentang sikap kritis dan pembelaannya terhadap rakyat masih bersumber dari tradisi lokal yang belum terkonfirmasi sumber kolonial sezaman. Karena itu, kepemimpinannya lebih tepat dibaca sebagai bentuk negosiasi elite pribumi dalam ruang kekuasaan yang tersedia, dan bukan sebagai gerakan perlawanan terbuka terhadap Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

Darban, A. A. (2004). Ulama Jawa dalam Perspektif Sejarah. *Humaniora*, *16*(1), 34.

Disparekrafbudpora. (2026, Februari 25). *Museum Kanjeng Sepuh Sidayu*. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik. https://disparekrafbudpora.gresikkab.go.id/detailpost/museum-kanjeng-sepuh-sidayu

Inagurasi, L. H. (2002). Sidayu: Kajian Arkeologi Perkotaan Masa Islam dan Kolonial. *Walennae: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara*, *5*(2), 11–21.

Kartodirdjo, S. (1974). Bureaucracy and Aristocracy. The Indonesian experience in the XlXth century. *Archipel*, *7*(1), 151–168. https://doi.org/10.3406/arch.1974.1165

Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia Pustaka Utama.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (t.t.). *Kanjeng Sepuh: Profil Masjid* [Go.id]. Sistem Informasi Masjid (SIMAS). Diambil 27 September 2026, dari https://simas.kemenag.go.id/profil/masjid/01.3.16.25.09.000041

Khusniyah, F. (2009). *Prasasti pada Situs Makam dan Masjid Jamik Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik* [Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya]. http://digilib.uinsa.ac.id/28897/

Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah* (2 ed.). Tiara Wacana.

Moertono, S. (1968). *State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century*. Cornell University, Southeast Asia Program, Modern Indonesia Project.

Muhammad Qosim. (1856). *Inskripsi Makam Kanjeng Sepuh Sidayu*. Kompleks Pemakaman Bupati Sidayu (Jl. Kanjeng Sepuh No.#5, Pengulu, Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61153).

Pemerintah Desa Kauman. (2025, Februari 12). *Sejarah Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik*. Pemerintah Kabupaten Gresik. https://desakauman.gresikkab.go.id/artikel/2025/2/12/sejarah-kanjeng-sepuh-sidayu-gresik

Pemerintah Desa Sidomulyo. (2023, Mei 9). *Sejarah Kecamatan Sidayu Gresik*. Pemerintah Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. https://desasidomulyo.gresikkab.go.id/artikel/2023/5/9/sejarah-kecamatan-sidayu-gresik

Prasasti, M. F. (2022). *Tipologi dan Ragam Hias Nisan di Situs Kompleks Pemakaman Ki Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik Jawa Timur* [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. https://digilib.uinsa.ac.id/57859/

Qomariyah, K., & Alrianingrum, S. (2019). Wisata Religi Makam Kanjeng Sepuh Sidayu Tahun 2000-2011. *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah*, *7*(3). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/29323

Redaksi NUGres. (2022, Januari 26). *Sejarah Kanjeng Sepuh Sidayu Sang Rojo Pandito*. NUGres. https://www.nugresik.or.id/sejarah-kanjeng-sepuh-sidayu-sang-rojo-pandito/

Rijal, A. K. (2017). *Perkembangan Masjid Besar Kanjeng Sepuh di tengah dinamika perbedaan aliran keislaman di Sidayu tahun 1980–2016* [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. http://digilib.uinsa.ac.id/view/creators/Rijal=3AAnwari_Khoirur=3A=3A.html

Rozal, A. S. (2012). *Peranan R.A.A.H.M. Wiranatakusumah V sebagai Bupati Bandung dalam Pengembangan Umat Islam pada Masa Kolonial Belanda, Facis Jepang dan Kemerdekaan* [Tesis Magister, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. https://digilib.uinsgd.ac.id/1748/

Rozat, I. M. S. (2024). Bentuk dan Makna Simbolik Ragam Hias Pada Mihrab Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sidayu. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *3*(5), 138–143. https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v3i5.3413

Sofiani, Y. (2018). Perubahan Kedudukan dan Kekuasaan di Priangan Pada Tahun 1800-1916. *Bihari: Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, *1*(1), 1–11. https://doi.org/10.37058/bjpsis.v1i1.846

Tim Pustaka Jawatimuran. (2007). *Kanjeng Sepuh Sedayu* [Go.id]. Pusaka Jawatimuran. https://jawatimuran.disperpusip.jatimprov.go.id/2013/12/11/kanjeng-sepuh-sedayu/

Zahroh, F., Srijaya, I. W., & Kadek Dedy Prawirajaya R. (2024). Pengaruh Kolonial Pada Tata Kota Sidayu Akhir Abad 19 Sampai Pertengahan 20: Kajian Morfologi Arkeologi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(5), 352–366. https://doi.org/10.5281/zenodo.10525940